



# Gunakan Bansos dan Hibah Tepat Sasaran

## Pontianak, BERKAT.

Bendahara Fraksi PPP DPRD Kalbar, H. Miftah, mengingatkan pemerintah provinsi Kalbar agar menyalurkan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2011 tepat sasaran, berdaya guna, efektif dan efisien. "PPP berharap anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau untuk pembangunan," kata Miftah belum lama ini.

Di samping itu, jelas Miftah Pemprov juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menyalurkan dana ini agar kasus temuan pemeriksaan BPK-RI di pos bantuan sosial maupun hibah seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

"Belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga juga bukan untuk kepentingan pencitraan politik me-nyambut tahun 2012," kata Miftah yang juga dapil Ketapang-KKU.

Dalam APBD Perubahan 2011, keseluruhan plafond anggaran belanja tercatat sebesar Rp2,1 triliun lebih yang didistribusikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Khusus belanja tidak langsung, masing-masing untuk belanja pegawai naik 3,5 persen (dari Rp413 miliar lebih menjadi Rp428 miliar lebih).

Kemudian, belanja hibah naik 18 persen (dari Rp65 miliar lebih menjadi Rp77 miliar lebih), belanja bantuan sosial naik 79 persen (dari Rp9,6 miliar menjadi Rp17 miliar), belanja bagi hasil naik 24 persen (dari Rp252 miliar bertambah Rp62 milyar), disusul dengan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota naik 11 persen (dari Rp142 miliar menjadi Rp158 miliar) dan belanja tak terduga naik 69 persen (dari Rp4,2 miliar menjadi Rp7,2 miliar).

Sedangkan untuk belanja langsung, baik itu belanja pegawai, belanja barang dan

jasa serta belanja modal, Fraksi PPP mengingatkan tentang waktu penyelesaian atau pencapaian program APBDP 2011 yang hanya efektif tersisa dua bulan. Dengan sisa waktu yang singkat itu, hendaknya instansi terkait benar-benar fokus pada program yang sudah diusulkan.

Saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Khatusitiwa Bersatu DPRD Kalbar, Andi Aswad, SH, mengatakan penyusunan perencanaan anggaran merupakan hal yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketika perencanaan, lanjutnya, anggaran APBDP dan APBDP 2011 ini dianggap sebagai rencana kegiatan ke-uangan yang akan menjadi barometer dalam menilai kegiatan pembangunan selama satu tahun.

"Dari aspek waktu, pengajuan nota keuangan APBDP Perubahan 2011 oleh Pemprov Kalbar, jelas sekali tidak



H. MIFTAH.

Foto: OKK

memberikan ruang waktu yang cukup untuk mengkajinya dengan tepat, akurat dan benar. Terutama untuk melihat korelasi dan dukungan dalam mencapai sasaran pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)," jelasnya. (aca)